

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan begitupun dengan perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat juga pada era ini menuntut profesionalitas pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Dan sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut dengan baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal (Audyta. et al., 2013).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya

baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga. (Mohamad Mahsun, 2012: 141)

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang digantikan dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah, terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik jika dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan. (Mohamad Mahsun, 2006: 4)

Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Berikut ini adalah tabel mengenai nilai LAKIP Provinsi se-Indonesia

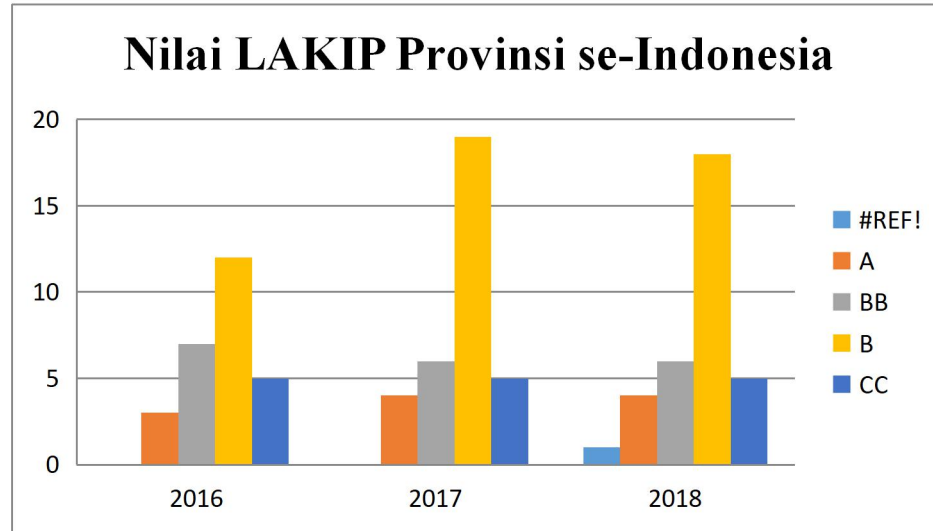
**Tabel 1.1**

**Nilai LAKIP Provinsi se-Indonesia**

<b>Peringkat</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
AA	-	-	1
A	3	4	4
BB	7	6	6
B	12	19	18
CC	5	5	5
C	7	-	-
D	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

Sumber: [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Berikut ini adalah diagram mengenai nilai LAKIP Provinsi se-Indonesia



**Gambar 1.1**

### **Diagram nilai LAKIP Provinsi se-Indonesia**

Dari tabel dan diagram nilai LAKIP Provinsi se-Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja dari instansi pemerintahan Provinsi se-Indonesia memang mengalami peningkatan namun belum optimal.

Berikut ini adalah tabel mengenai nilai LAKIP Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat

**Tabel 1.2**

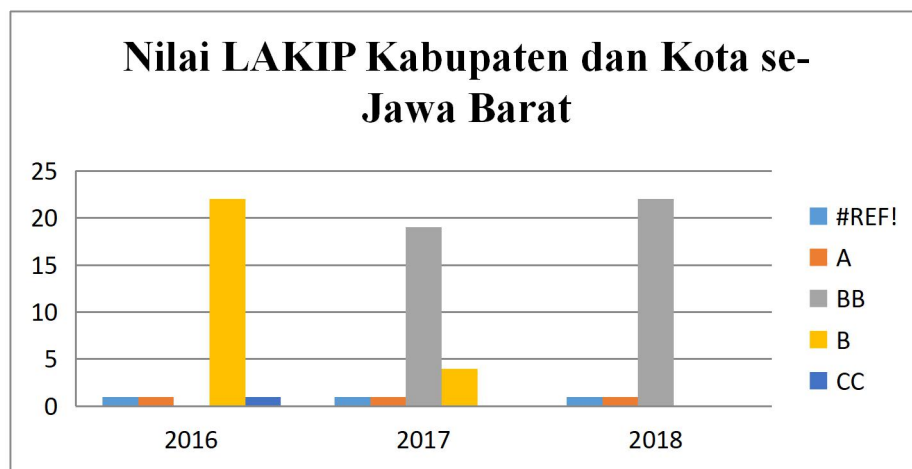
### **Nilai LAKIP Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat**

<b>Peringkat</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
AA	-	-	-
A	1	1	1

BB	1	1	4
B	-	19	22
CC	22	4	-
C	3	2	-
D	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Sumber: [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Berikut ini adalah diagram mengenai nilai LAKIP Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat



**Gambar 1.2**

**Diagram nilai LAKIP Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat**

Dari tabel dan diagram nilai LAKIP Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja dari instansi pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat memang mengalami peningkatan namun belum optimal.

Fenomena terkait kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Bandung Barat yang penulis kutip dari Tribun Jabar yaitu pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai CC dari KemenPAN RB. Kabupaten Bandung Barat mendapat

penilaian CC, untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (KemenPAN RB). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menggambarkan kinerja yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas pelaksanaan program dan kegiatan, dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal. Dalam penilaian 5 komponen yang dievaluasi dari KBB terbilang masih rendah yakni perencanaan kerja yang bobotnya 35, pengukuran kerja 20 bobot, pelaporan kerja 15 bobot, evaluasi kerja hanya 10 bobot dan pencapaian kinerja yang hanya 20 bobot. Namun dengan demikian Kabupaten Bandung Barat hanya mampu mengumpulkan bobot nilai 50-65. Dari skor yang diraih yang hanya berbobot 50-65, komponen yang paling mempengaruhi penilaian terletak pada perencanaan kerja yang selalu copy paste setiap tahunnya dan kurang selaras dengan Visi Misi Bupati. Kemudian kekurangan Pemkab Kabupaten Bandung Barat terletak pada ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran.

(<http://jabar.tribunnews.com/2017/01/26/kbb-dapat-nilai-cc-kinerja-pemerintah-dinilai-mengecewakan>).

Menurut kebijakan tindak lanjut pelaksanaan peraturan presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menyatakan kategori LAKIP daam tabe sebagai berikut:

**Tabel 1.3****Kategori penilaian LAKIP**

<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	>0-30

Fenomena lainnya terkait kinerja pemerintah yang penulis kutip dari pikiran rakyat yaitu menginjak usia 11 tahun, Bandung barat masih jauh dari cita-cita pemekaran. Menginjak usia yang ke-11 pada 19 Juni 2018, Kabupaten Bandung Barat atau KBB dinilai belum berhasil mewujudkan cita-cita ketika dulu dimekarkan dari Kabupaten Bandung. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Bandung Barat justru menjadi daerah termiskin keenam di Jawa Barat. Tujuan utama pemekaran sehingga lahirnya KBB adalah untuk percepatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selama 11 tahun terbentuknya KBB, tujuan itu masih jauh dari harapan, sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa tujuan dari pencapaian kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan. Di antaranya, bisa dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Bandung Barat. Ironisnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga jauh lebih rendah dari rata-rata IPM di Jabar, yang berada di angka 70,69. Sementara IPM

Bandung Barat pada 2017 ialah 66,63. Ironis lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar yang juga masih jauh dari kata memuaskan. Infrastruktur dasar itu, contohnya, ialah-jalan kabupaten yang panjangnya kurang lebih 518 kilometer. Sekitar 40 persen atau sekitar 207 kilometer masih dalam kondisi rusak ringan sampai berat. Di samping itu juga masyarakat di Bandung Barat juga masih relatif kesulitan mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran terbuka di KBB juga masih cukup tinggi.

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/19/menginjak-usia-11-tahun-bandung-barat-masih-jauh-dari-cita-cita-pemekaran>)

Fenomena lainnya yang penulis kutip dari Juara News yaitu DPRD Kabupaten Bandung Barat menilai kinerja pembangunan yang dilakukan Pemkab Bandung Barat tidak signifikan. Hal itu terlihat dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 di Lembang, Jumat (12/5/2017).

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menilai kinerja pemerintah daerah selama 2016 stagnan alias tidak mengalami perkembangan yang berarti. Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti beberapa satuan kerja perangkat dinas (SKPD). Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menangani infrastruktur, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP karena banyak tugas mereka yang tidak selesai.



Dia menilai seharusnya Pemkab lebih meningkatkan kinerjanya menjelang akhir masa kepemimpinan Bupati Abubakar pada 2018 nanti. Pasalnya berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang belum tuntas.

Tidak lupa dia mengingatkan agar sejumlah kepala SKPD tidak terbawa arus politik menjelang pilkada serentak pada 2018. Sebab pejabat pemerintah seharusnya memprioritaskan kinerja untuk kepentingan publik, bukan atasan.

Sekda Bandung Barat Maman Sunjaya membantah jika pembangunan di KBB selama 2016 tidak berkembang. Walaupun diakuinya beberapa hal masih perlu dilakukan perbaikan seperti yang direkomendasikan DPRD. “Kalau berkembang ya berkembang. Namun rekomendasi DPRD ini dimaksudkan agar tujuan pembangunan agar lebih fokus.” urainya

(<https://juaranews.com/berita/26294/13/05/2017/dprd-kinerja-pemda-kbb-dianggap-tak-signifikan>).

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai masih kurang maksimal sehingga tujuan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum tercapai, contohnya dilihat dari dimensi dampak (*impact*) dengan indikator yang dipakainya ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan, tingginya angka kemiskinan, masih banyaknya perencanaan yang belum selesai, dan bila dilihat dari dimensi manfaat (*benefit*) dengan indikator yang dipakainya ialah tingkat kepuasan

masyarakat yaitu Kabupaten Bandung Barat masih jauh dari cita-cita pemekaran walau sudah 11 tahun pemekaran, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dengan penganggaran.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2014).

Kualitas pengelolaan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhann pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik, tidak terlepas dari sistem pengawasan yang baik, bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat sebagai Bawasda (Badan Pengawasan Daerah) dan mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Wiguna et al., (2015).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri dalam Negeri No 51 tahun 2010).

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan asas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kinerja pemerintah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007:87).

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin transparannya pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015), Adiwirya dan Sudana (2015).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan Wiguna et al., (2015). Faktor yang kedua yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan penelitian Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012). Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah transparansi pengelolaan keuangan Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015); Adiwirya dan Sudana (2015).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ait Novatiani, R Wedi Rusmawan Kusumsah dan Diandra Pepi Vabiani (2019) tentang “Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah” dan penelitian dari Fitfit Purnama dan Nadirsyah (2016) yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja**

**Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat).”**

**1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial.
7. Seberapa besar pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial.

8. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara simulasi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Bandung Barat

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang akuntansi.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**



a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, khususnya mengenai Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah survey pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, penulis berharap penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

c. Bagi Pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat 40552 Jawa Barat - Indonesia, tepatnya pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitian dimulai pada mulai Desember 2019 sampai dengan selesai.